JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.4, No.1 Januari 2026
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

REVITALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN TANJUNG PINGGIR, KOTA PEMATANG SIANTAR

Oleh:

Fitria Hanifah[1]
Nasywa Al dzakira[2]
Tyfany Maynurizki[3]
Jimmi Kurnia Aryazona[4]
Muhammad Mujahid Al Islamy[5]
Bahrudi Efendi Damanik[6]

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa Pematang Siantar
Alamat: Jl. Sudirman, Banjar, Kec. Siantar Bar., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara (21142).
Korespondensi Penulis: fitriahanifah64@gmail.com, nasywaaldzakira@gmail.com, tyfanymaynurizky24@gmail.com, jmmyaryazna@gmail.com, muhammadmujahiid7@gmail.com, bahrudiefendi@gmail.com.

***Abstract**. Slums remain a serious problem in Pematangsiantar City, particularly in Tanjung Pinggir Village, which is adjacent to the city's final disposal site (TPA). This area experiences significant physical, social, economic, and environmental pressures. In 2025, the Department of Housing and Settlement recorded 1,577 uninhabitable households, while the new management program covered 771 households. This study aims to analyze the condition of slums, the waste management system, and formulate strategies to revitalize community empowerment in Tanjung Pinggir. The research method used is a descriptive qualitative approach through field observations, interviews, and a review of official government documents. The results indicate that slums are caused by building density, weak sanitation access, minimal waste management facilities, and low community participation. Revitalizing community empowerment has proven to be the*

Received November 24, 2025; Revised December 20, 2025; January 06, 2026
*Corresponding author: *fitriahanifah64@gmail.com*

most effective strategy, as it integrates physical, social, economic, and institutional aspects. This study recommends strengthening community institutions, developing waste banks, establishing recycling-based business units, and providing ongoing support from the local government.

Keywords: *Slums, Community Empowerment, Revitalization, Waste Management, Tanjung Pinggir.*

Abstrak. Permukiman kumuh masih menjadi persoalan serius di Kota Pematangsiantar, khususnya di Kelurahan Tanjung Pinggir yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kota. Kawasan ini mengalami tekanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Pada tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat terdapat 1.577 rumah tangga tidak layak huni, sementara program penanganan baru mencakup 771 rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi permukiman kumuh, sistem pengelolaan sampah, serta merumuskan strategi revitalisasi pemberdayaan masyarakat di Tanjung Pinggir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara, serta kajian dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekumuhan disebabkan oleh padatnya bangunan, lemahnya akses sanitasi, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Revitalisasi pemberdayaan masyarakat ditemukan sebagai strategi paling efektif, karena mampu mengintegrasikan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan komunitas, pengembangan bank sampah, pembentukan unit usaha berbasis daur ulang, serta pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Pemberdayaan Masyarakat, Revitalisasi, Pengelolaan Sampah, Tanjung Pinggir.

LATAR BELAKANG

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit social dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana

lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.(Muhammad & Sulistyarso, 2016). Penanganan permasalahan permukiman kumuh ini penting sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.(Marwah et al., 2024). Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi meningkatkan tuntutan penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Namun, keterbatasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar permukiman menyebabkan daya dukung lingkungan menurun dan turut memicu munculnya kawasan kumuh baru(Yusman, 2014)

Permukiman kumuh menjadi salah satu persoalan serius dalam pembangunan kota-kota di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pematang siantar mencatat bahwa sebanyak 1.577 rumah tangga hidup di tempat tinggal kumuh, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Hal itu terungkap saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPRD pada pembahasan P-APBD 2025 di Gedung DPRD Pematang siantar. Kota Pematang Siantar sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara, tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Salah satu kawasan yang tergolong kumuh adalah di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba, Pematang Siantar. Kawasan ini dikenal sebagai daerah kumuh dengan legalitas lahan yang tidak jelas, karena merupakan tanah garapan. Selain kumuh, wilayah ini juga dipengaruhi masalah sosial seperti menjamurnya pekerja seks komersial dan warung remang-remang. Selain itu, Kelurahan Tanjung Pinggir juga dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga masyarakat menggantungkan penghidupan dari memulung sampah. Sementara sebagian perempuan berprofesi sebagai pekerja seks komersial di sekitar pasar. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak-anak di wilayah tersebut.(Aruan & Rawaty, 2020)

Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan program seperti KOTAKU, Bedah Rumah, dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa intervensi yang dominan bersifat fisik sehingga kurang menyentuh aspek sosial, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, sebagian kawasan kembali mengalami degradasi setelah program berakhir.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya revitalisasi pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.(Febrinia Salindri, 2023).

KAJIAN TEORITIS

Permukiman kumuh dipahami sebagai kawasan hunian yang mengalami penurunan kualitas akibat ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, dan rendahnya akses terhadap pelayanan dasar kota. Kondisi sanitasi yang buruk, drainase yang tidak berfungsi, dan bangunan semi permanen merupakan indikator utama kekumuhan. Dinamika urbanisasi sering kali menjadi penyebab meningkatnya tekanan permukiman di wilayah perkotaan. Ketika kesempatan kerja dan fasilitas ekonomi terpusat di kota, masyarakat dari desa bermigrasi tanpa diimbangi kemampuan pemerintah menyediakan hunian layak sehingga mendorong tumbuhnya permukiman informal.

Pembentukan permukiman kumuh juga berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan pendapatan membuat masyarakat memilih menetap di lokasi marginal seperti bantaran sungai atau sekitar TPA. Lemahnya tata kelola pemerintahan turut memperburuk kondisi ketika program penataan permukiman lebih menekankan pembangunan fisik tanpa melibatkan masyarakat. Kurangnya partisipasi berdampak pada rendahnya kepemilikan warga terhadap program sehingga hasil pembangunan tidak berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan yang menempatkan warga sebagai subjek pembangunan. Proses ini mencakup peningkatan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola lingkungannya. Pendekatan partisipatif ditemukan lebih efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang dibandingkan model intervensi top-down. Namun, penelitian di Pematang Siantar menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok marginal seperti pemulung yang rentan terhadap kondisi lingkungan buruk.

Revitalisasi pemberdayaan muncul sebagai strategi yang menekankan penguatan kembali potensi dan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga peningkatan sosial ekonomi dan tata kelola lingkungan. Hingga saat ini, berbagai studi menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari

perencanaan hingga pemeliharaan(Raya, 2023). Pengelolaan sampah juga menjadi elemen penting yang tidak terpisahkan dari perbaikan permukiman. Prinsip reduce, reuse, recycle perlu diterapkan melalui program pemilahan sampah, pembentukan bank sampah, dan penguatan kelembagaan lingkungan. Secara keseluruhan, integrasi konsep permukiman kumuh, pemberdayaan, revitalisasi, dan pengelolaan sampah menjadi dasar analitis dalam memahami tantangan penataan lingkungan di Tanjung Pinggir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dengan subjek penelitiannya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, sosial, atau budaya. Metode ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur dalam angka, memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dimensi yang lebih luas dari realitas sosial.(Sugiyono, 2019)

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Kota Pematang Siantar. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025. Penentuan sumber data pada responden yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non probability sampling yaitu samplingincidental. Penulis menggunakan metode penelitian dengan empat cara yaitu : observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fisik dan Lingkungan Permukiman Kumuh

Observasi di lapangan menggambarkan bahwa kualitas fisik permukiman di Tanjung Pinggir jauh dari standar hunian layak. Sebagian besar rumah dibangun dengan material seadanya seperti papan tipis, seng berkarat, dan material daur ulang. Dokumentasi visual yang diambil peneliti menunjukkan rumah saling berhimpitan tanpa batas pekarangan, ventilasi minimal, dan tidak adanya saluran drainase permanen. Konsekuensinya, saat musim hujan, air limbah rumah tangga bercampur dengan air hujan dan mengalir ke jalan setapak, memperburuk sanitasi lingkungan.

Ketidakteraturan tata ruang permukiman bukan hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga minimnya regulasi atau pengawasan tata ruang di tingkat kelurahan. Wawancara dengan aparat kelurahan menunjukkan bahwa banyak bangunan berdiri tanpa izin mendirikan bangunan, sehingga kontrol pemerintah terhadap tata ruang sangat terbatas. Hal ini diperparah oleh kondisi tanah yang sebagian merupakan lahan bekas perladangan dan bantaran sungai kecil yang kemudian dihuni tanpa perencanaan matang.

Kondisi fisik permukiman yang buruk ini berimplikasi langsung pada meningkatnya kerentanan terhadap penyakit lingkungan seperti diare, ISPA, dan penyakit kulit. Berdasarkan wawancara dengan warga, kasus penyakit tersebut sering dialami anak-anak, terutama saat curah hujan tinggi dan genangan meningkat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan fisik tidak dapat dilepaskan dari penataan lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat.

Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat

Warga Tanjung Pinggir mayoritas bekerja sebagai pemulung, buruh lepas, pedagang kecil, atau pekerja harian di sektor informal. Kedekatan permukiman dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadikan aktivitas memulung sebagai sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga. Pendapatan yang tidak menentu menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki kondisi hunian atau membangun fasilitas sanitasi sangat terbatas.

Gambar 1. Kondisi Penumpukan Sampah di TPA Tanjung Pinggir

Foto ini menunjukkan akumulasi sampah yang sangat tinggi serta operasi alat berat untuk meratakan dan memindahkan material. Kondisi ini mengindikasikan tingginya volume sampah harian dan keterbatasan kapasitas pengolahan di TPA.

Tingkat pendidikan yang relatif rendah juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kesadaran sanitasi. Berdasarkan wawancara, sebagian warga belum memahami risiko kesehatan akibat pembuangan sampah sembarangan ataupun penggunaan air yang tidak higienis. Sebagian besar masih beranggapan bahwa sampah rumah tangga tidak perlu dipilah karena akan berakhir di TPA terdekat. Di sisi lain, modal sosial masyarakat seperti kebiasaan gotong royong masih ada, tetapi belum berkembang menjadi gerakan yang konsisten. Warga bersedia terlibat dalam kerja bakti kebersihan, namun partisipasi mereka masih bergantung pada instruksi aparat kelurahan. Hal ini menunjukkan belum adanya transformasi pengetahuan menjadi kesadaran kolektif yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Sistem Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pemukiman

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan sampah di Tanjung Pinggir belum berjalan secara sistematis. Karena lokasi berdekatan dengan TPA, sebagian besar warga terbiasa membuang sampah langsung ke area terbuka, parit, atau mengangkut sendiri ke TPA tanpa pemilahan. Keterbatasan fasilitas seperti TPS, kontainer sampah, dan alat pemilah menyebabkan sampah rumah tangga sering menumpuk di sekitar pemukiman sebelum diangkut.

Beberapa warga yang bekerja sebagai pemulung sebenarnya memiliki keterampilan dalam memilah sampah anorganik yang bernilai ekonomis. Namun kemampuan ini belum terorganisir pada tingkat komunitas karena tidak adanya kelembagaan lokal seperti bank sampah atau kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa potensi ekonomi lokal dari aktivitas pemilahan sampah belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi tersebut sejalan dengan konsep *reduce–reuse–recycle* yang menjadi salah satu pendekatan dalam pemberdayaan lingkungan.

Analisis Integratif Arah Revitalisasi Penanganan Permukiman Kumuh

Sintesis dari temuan lapangan menunjukkan bahwa permasalahan permukiman kumuh di Tanjung Pinggir terjadi karena tumpang tindih persoalan fisik, sosial-ekonomi,

dan kelembagaan. Ketidakteraturan bangunan dan sanitasi buruk tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya kapasitas masyarakat mengelola lingkungannya. Dengan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pemberdayaan masyarakat merupakan strategi paling tepat karena:

Mendorong masyarakat terlibat langsung dalam perbaikan lingkungan. Mengoptimalkan potensi lokal seperti keterampilan pemulung dalam memilah sampah. Membentuk kelembagaan yang dapat menjaga keberlanjutan program pemerintah. Menyelesaikan persoalan fisik dan perilaku secara simultan.Pendekatan ini sesuai dengan prinsip penanganan permukiman kumuh yang menekankan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan sebagai satu kesatuan.

Gambar 2. Operasional Alat Berat dalam Mengelola Timbunan Sampah

Gambar ini menggambarkan penggunaan alat berat untuk menangani volume sampah yang terus meningkat. Kondisi lapangan menunjukkan timbunan sampah yang menggunung dan membutuhkan intervensi teknis berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan Tanjung Pinggir masih menghadapi permasalahan permukiman kumuh yang dipengaruhi oleh kondisi fisik hunian yang tidak layak, keterbatasan sanitasi, serta kedekatan dengan TPA yang menimbulkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Situasi ini diperparah oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dan minimnya kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat. Dari sisi sosial, sebagian warga telah berupaya melakukan pemilahan sampah secara mandiri, namun kegiatan tersebut belum terarah karena belum adanya kelembagaan atau program pendukung seperti bank sampah. Sementara itu, potensi pemberdayaan masyarakat sebenarnya cukup besar, terlihat dari aktivitas dan keterlibatan warga dalam kegiatan lingkungan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, revitalisasi pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang paling relevan untuk memperbaiki kondisi kawasan. Upaya seperti peningkatan kapasitas masyarakat, pembentukan struktur kelembagaan lokal, penguatan perilaku sadar lingkungan, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan fasilitas dasar dinilai penting untuk mengurangi kekumuhan dan meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan

DAFTAR REFERENSI

Aruan, R. V., & Rawaty, N. M. (2020). Internalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Madya Pematang Siantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *3*(2), 761–768. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.365

Febrinia Salindri, F. (2023). Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Indonesia. *Geography Science Education Journal (GEOSEE)*, *4*, 2754–391. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geosee/index

Marwah, M., Latief, R., & Suhaeb, M. I. S. (2024). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. *Urban and Regional Studies Journal*, *6*(2), 199–208. https://doi.org/10.35965/ursj.v6i2.4491

Muhammad, B., & Sulistyarso, H. (2016). Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran dengan Pendekatan Eco-Settlements. *Jurnal Teknik ITS*, *5*. https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.18570

Raya, U. P. (2023). *Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan Melalui Program Kampung Bersih Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Penanganan Sampah di Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kota Kuala Kapuas*. *1*, 40–50.

Sugiyono, A. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).

Yusman, S. K. F. (2014). *KAJIAN KARAKTERISTIK DAN METODE PENANGANAN KAWASAN KUMUH (STUDI KASUS : KECAMATAN SEMARANG TIMUR , KOTA SEMARANG) PENDAHULUAN Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan , kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan mening*. *3*(2), 244–253.

Adam (2020). Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi. PERSPEKTIF, 9 (1): 66-78.Alit, I.K. (2005).

Fitria, N., & Setiawan, R.P. (2014). Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. JURNAL TEKNIK POMITS, 3(2):240-244.

Anisa Riyulida Dan S Sunarti. (2019). Peningkatan KualitasPermukiman Kumuh Untuk Mendukung Wisata Kampung Pelangi Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 15(2): 83-95.

Wilandari, A. & Sulistyarso, H. (2017). Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi. JURNAL TEKNIK ITS, 6(2): 557-560.

Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.